

Pelanggaran Pada Kampanye Tahun 2020 di Surabaya

Nevi Dwi Kirana

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Email: nevi.19047@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Artikel ini berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan kampanye yang dilaksanakan ditengah-tengah pandemic covid-19 di Kota Surabaya. Dalam artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dalam mencari data, penulis menggunakan teknik studi literatur. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, ataupun berita yang berada di internet. Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa paslon di beberapa daerah yang telah melanggar protokol Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan kampanye. Jika ada pihak yang bersangkutan melanggar aturan yang telah dibuat, maka akan segera ditindak lanjut oleh Bawaslu.

Kata Kunci: Pilkada, Kampanye, Pelanggaran Protokol Kesehatan

Abstract

This article based on the research that aimed to determine the state of the political campaign during Covid-19 pandemic in Surabaya City. In this article, the authors used descriptive qualitative methods and literature study techniques to collect the data. The data used were secondary data from books, theses, journals, or news. The results of this study indicated that there were several candidate pairs in several areas who had violated the Health Protocol during political campaign activities. If there were any rule violation, Bawaslu will immediately follow up the situation.

Keywords: Pilkada, Campaign, Health Protocol Violation

PENDAHULUAN

Covid-19 penyebarannya berawal pada akhir Tahun 2019 dan diduga berasal dari sebuah "pasar basah" yang terletak di daerah Wuhan, China. Penyebaran virus tersebut berlangsung cepat. Dalam waktu beberapa bulan, virus tersebut menyebar ke dataran Eropa, Amerika Serikat, Amerika Selatan, serta Afrika. Hingga pertengahan 2020, sebanyak 25,1 juta jiwa di seluruh dunia telah terkonfirmasi oleh virus ini. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara juga terjangkit virus tersebut. Sebanyak 172 ribu jiwa telah terpapar dan masih terus bertambah seiring berjalannya waktu. Meskipun virus tersebut menelan banyak korban jiwa, namun ada pasien yang berhasil melewati masa buruk tersebut.

Pemerintah dan masyarakat bergotong royong meminimalisir persebaran virus tersebut. Pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti kewajiban penggunaan masker, menjaga jarak 1-1,5 meter, dilarang berkumpul atau bergerombol, dan diberlakukannya jam malam. Pemerintah juga menghimbau tempat umum seperti halte bis atau di area trotoar memiliki fasilitas seperti wastafel yang dilengkapi sabun dan tisu. Bilik disinfektan juga tersedia di tempat perbelanjaan atau tempat umum lainnya. Penerapan protokol kesehatan diperketat pada tempat wisata, tempat kerja ataupun tempat makan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat meminimalisir dan menghambat persebaran virus corona tersebut.

Penyebaran virus ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, namun sektor pendidikan dan ekonomi juga merasakan dampak yang besar karena virus tersebut. Pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk melakukan proses belajar-mengajar secara Daring (dalam jaringan). Pemerintah juga memberikan bantuan berupa berupa paket internet untuk membantu proses belajar-mengajar (*Bantuan Kuota Data dari Pemerintah, Ini Daftar Situs yang Bisa Diakses*, 2020). Meskipun masih menimbulkan pro dan kontra, pembelajaran daring ini dirasa menjadi solusi terbaik guna memutus tali penyebaran virus covid hingga saat ini.

Pada tanggal 16-18 Mei 2020, terdapat survei yang digelar oleh Indikator Politik Indonesia terkait kinerja pemerintah dalam menangani covid-19. Hasil dari survei tersebut menunjukkan 57,6% menyebut virus corona mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia memburuk, dan 23,4% menyebut kondisi ekonomi Indonesia memburuk sekali akibat dari virus corona (*Survei*, 2020). Masyarakat juga menilai bahwa kondisi ekonomi rumah tangga memburuk dibanding sebelum adanya pandemi covid-19. Dari hasil survei 65,4% responden mengatakan kondisi ekonomi rumah tangga memburuk, dan angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding survei sebelumnya yakni sebanyak 20,9% (*Survei*, 2020).

Corona virus tidak hanya berdampak pada pendidikan, perekonomian, dan kesehatan, tetapi juga berdampak bagi aktifitas politik. Perlu kita ketahui beberapa waktu lalu di beberapa kota-kota di Indonesia, telah mengalami situasi panas akibat disahkannya RUU Omlibuslaw: RUU Cipta Kerja (*DPR Sahkan "Omnibus Law" Undang-Undang Cipta Kerja*, 2020). Masyarakat dari berbagai golongan bersatu untuk menyuarakan aspirasinya di beberapa Gedung DPR serta Gubernur di beberapa daerah di Indonesia (*Demo Kontra UU Cipta Kerja Meluas di Berbagai Daerah*, 2020). Hal tersebut menimbulkan bertambahnya

angka pasien yang positif virus covid-19 (*Puluhan Reaktif Covid-19, Ancaman di Tengah Demo Itu Nyata*, 2020).

Aktifitas-aktifitas politik tidak berhenti sampai disana. Tahun 2020 adalah pergantian masa jabatan untuk Gubernur, Walikota dan Bupati. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan kampanye akan dilakukan serentak pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020, dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 (*Kampanye Pilkada Serentak Dimulai 26 September, Ini Jadwal Lengkapnya*, 2020). KPU juga menyebutkan bahwa pelaksanaan kampanye serta PILKADA ini harus sesuai dengan protokol kesehatan yang telah di sepakati, yaitu 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Hal ini dilakukan agar PILKADA serta kampanye dapat dilaksanakan dengan situasi yang kondusif dan tidak menyebabkan peningkatan pada jumlah pasien corona yang aktif.

Pada kenyataannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan telah menemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan berjumlah 237 kasus pada 10 hari pertama (*Pelanggaran Protokol Kesehatan saat Kampanye Naik Hampir 60%*, 2020). Menurut antaranews (2020), Bawaslu mengungkapkan adanya 16 kasus tentang pelanggaran protokol Kesehatan yang terjadi di Jawa Tengah dalam periode 26 September – 22 Oktober 2020. Pelanggaran kasus tersebut terdiri dari 15 kasus tentang peserta kampanye yang melebihi 50 orang serta 1 kasus tentang adanya kelibatan anak-anak dalam lokasi kampanye. Sri Wahyu Ananingsih selaku Komisioner Bawaslu Jawa Tengah mengatakan bahwa dari 16 kasus tersebut sebanyak 14 kasus sudah diberi surat peringatan, satu kasus himbauan lisan, lalu 1 kasus lagi telah menjadi temuan dugaan pelanggaran (ANTARA News, 2020). Mochammad Afifuddin selaku anggota Bawaslu memaparkan bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan saat kampanye dengan memberi peringatan tertulis terhadap pasangan calon atau tim kampanye hingga membubarkan kampanye (*Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada Meningkat*, 2020).

METODE PENELITIAN

Informasi adalah kumpulan dari beberapa data yang telah diolah ataupun diproses dengan beberapa prosedur pengolahan data (Darmawan, 2017). Informasi juga terdiri dari beberapa data yang dapat diolah, dan informasi adalah sebuah dasar untuk untuk mengambil keputusan (Dewi dkk., 2020).

Informasi adalah alat yang sangat penting, karena informasi dapat membantu untuk mengambil keputusan dalam kegiatan sehari-hari (Kountur, 2003). Informasi tidak hanya dianggap sebagai sebuah alat untuk memenuhi pengetahuan, akan tetapi informasi juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Saat ini informasi sudah menjadi bagian dari masyarakat, bahkan manusia memerlukan sebuah informasi sebelum mengambil sebuah keputusan.

Dalam penelitian, Teknik pengumpulan data sangat berperan penting dalam sebuah penelitian. Peran Teknik pengumpulan data dapat membantu peneliti dalam memperoleh sebuah data yang valid (Dewi dkk., 2020). Menurut Gast dalam Dewi (2020) sebelum melakukan pengumpulan data harus menentukan jenis metode yang akan digunakan, agar nantinya data yang diperoleh akurat, objektif serta relevan.

Dalam artikel ini metode yang akan digunakan adalah metode Studi Literatur. Metode literatur adalah sebuah catatan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan terekam dalam bentuk tulisan, gambar ataupun karya-karya dari seseorang (Sugiyono, 2005). Data yang akan digunakan untuk mengumpulkan data adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, tesis, jurnal, skripsi maupun berita. Data-data yang sudah dikumpulkan lalu akan ditinjau lebih lanjut agar dapat disusun Kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak China melaporkan adanya penyebaran virus Covid-19 kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada akhir desember 2019 (*Kajian virus corona muncul di Wuhan sejak akhir Agustus, China sebut hasil itu "sebagai hal yang konyol,"* 2020), hingga November 2020 pandemi tersebut belum sepenuhnya surut. Indonesia juga mengalami hal yang serupa, berbagai kegiatan yang berpotensi meningkatkan angka penyebaran covid-19 diberhentikan untuk sementara waktu hingga waktu yang belum ditentukan. Kegiatan yang dimaksud seperti kegiatan belajar mengajar, agenda pertandingan olahraga, pertunjukan musik, hingga *visit* ke kota-kota tetangga. Kegiatan-kegiatan tersebut dikhawatirkan menyebabkan masyarakat menjadi bergerombol dan dapat meningkatkan penyebaran virus. Maka dari itu selaras dengan pembatasan kegiatan tersebut, pemerintah memberi anjuran dengan melaksanakan 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan).

Beberapa negara tidak mau mengambil resiko dengan menggelar Pilkada ditengah pandemic covid-19. Negara-negara tersebut memilih untuk menunda hingga waktu yang

belum ditentukan, meskipun ada juga negara yang telah menentukan pelaksanaannya pada akhir Tahun 2020. beberapa negara yang memilih menunda pilkada tersebut adalah Botswana, Chad, Ethiopia, Gabon, Gambia, Kenya, Liberia, Nigeria, Somalia, Afrika Selatan, Zimbabwe, Argentina, Bolivia, Brazil, Kanada, Chili, Kolombia, Perancis, Meksiko, Paraguay, Peru, Kepulauan Falkland, Uruguay, Australia, Bangladesh, Hongkong, Kaledonia Baru, India, Indonesia, Maldives, Selandia Baru, Kirgistan, Pakistan, Kepulauan Solomon, Armenia, Bosnia dan Herzegovina, Isle of Man, Guernsey, Siprus, Jerman, Kosovo, Romania, Slovakia, Swiss, Inggris, Gibraltar, dan Oman (Kumparan, 2020).

Di Indonesia Pemilu dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020 terpaksa diundur hingga 9 Desember 2020. DPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Pemilihan Umum mengadakan rapat dan memutuskan PILKADA pada tanggal 9 Desember 2020 dan kampanye dilangsungkan sejak awal bulan September (*Corona Menghentikan Semua, Kecuali Pilkada*, 2020). Sebelumnya dalam rapat tersebut, KPU menyebutkan beberapa opsi yaitu: pertama, Pilkada dilaksanakan dalam waktu 3 bulan kedepan (9 Desember), kedua, Pilkada ditunda hingga 17 Maret 2021, ketiga, Pilkada diundur hingga 12 bulan (29 September 2021) (*Setahun Jokowi-Ma'ruf*, 2020). Beberapa pihak memberi suara, idealnya Pilkada ditunda hingga Tahun 2021 untuk mengurangi resiko persebaran virus (*Setahun Jokowi-Ma'ruf*, 2020).

Selain itu, beberapa pihak menilai pemerintah mengambil tindakan yang nekat, dan tidak memperhitungkan dampak-dampak dari peyelenggarakan PILKADA. bahkan tercatat per tanggal 20 September 2020 sudah tercatat 92 orang dari KPU positif virus covid-19 (*Corona Menghentikan Semua, Kecuali Pilkada*, 2020). Meskipun begitu Presiden RI: Joko Widodo menyebutkan bahwa PILKADA tetap harus dilaksanakan meskipun pada saat pandemi covid-19 (*Jokowi: Pilkada Serentak 2020 Harus Tetap Dilakukan*, 2020). Akan tetapi PILKADA dilaksanakan harus dengan menerapkan protokol kesehatan (*Jokowi: Pilkada Serentak 2020 Harus Tetap Dilakukan*, 2020). Djohermansya Djohan selaku guru besar IPDN mengatakan adanya empat alasan yang mengharuskan pemilu tetap harus dilaksanakan meskipun adanya pandemi covid-19. Pertama, Pilkada adalah sebuah alat untuk memperdalam demokrasi. Kedua, dengan adanya Pilkada diharapkan melahirkan seorang pemimpin yang kompeten dan berintegritas juga tidak korupsi. Ketiga, dengan adanya Pilkada diharapkan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Keempat, pemimpin yang dipilih melalui Pilkada dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra selaku guru besar Universitas Islam Negeri menilai bahwa pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi seperti tidak memiliki empati pada korban yang telah meninggal karena Covid-19 (*Pilkada Tetap Dilaksanakan di Tengah Pandemi, Azyumardi, 2020*). Azyumardi juga menambahkan bahwa Pilkada dapat menyebabkan covid-19 gelombang ke 2. Namun Tito Karnavian selaku Menteri dalam Negeri berpendapat bahwa covid-19 masih terkendali (*Pilkada Tetap Dilaksanakan di Tengah Pandemi, Azyumardi, 2020*). Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menjelaskan alasan mengapa Pilkada tetap harus dilakukan, menurutnya alasan Pilkada tetap terlaksana adalah untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih (*Ini Alasan Pilkada Tetap Dilaksanakan, 2020*).

Meskipun Pilkada tetap dilaksanakan, Pilkada harus dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan. KPU telah menerbitkan sebuah revisi yang berisikan larangan dalam kampanye untuk membatasi pertemuan tatap muka serta tidak menciptakan kerumunan masa (BBCnews, 2020). KPU juga menduga nantinya kampanye akan dilaksanakan secara Daring, tetapi tidak semua kandidat akan melaksanakan kampanye secara Daring. Ketua tim pemenangan pasangan Bagyon-Wahyono dan Supardjo selaku Calon Walikota Solo mengatakan bahwa kampanye yang dilakukan secara Daring dinilai kurang efektif dalam mengaet dukungan (BBCnews, 2020).

KPU telah memperbarui aturan yang terkait dalam pelaksanaan kampanye Tahun 2020, aturan tersebut tertuang dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Kompas (2020) merangkum larangan serta sanksi tersebut, yaitu: pertama, Pelanggaran Protokol Kesehatan. Dalam pasal 88A berbunyi setiap penyelenggara pemilihan, pasangan calon, partai politik, penghubung pasangan calon, tim kampanye, atau semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus melaksanakan protokol kesehatan. Jika terlihat adanya pelanggaran maka Bawaslu akan memeberikan peringatan tertulis kepada pihak yang bersangkutan. Jika teguran tersebut tidak diindahkan maka Bawaslu berhak menyampaikan pelanggaran kepada polisi agar pihak tersebut dapat diberi sanksi yang sesuai dengan undang-undang. Kedua, menghadirkan massa saat pengundian nomor urut. Setiap pihak yang terlibat dalam pemilu dilarang membawa massa pendukung baik diluar maupun didalam ruangan saat dilakukannya pengundian nomor urut paslon. Jika melanggar maka Bawaslu berhak memberi sanksi dengan peringatan tertulis. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan maka Bawaslu akan menyerahkan ke KPU untuk diberi sanksi Administrasi. Saksi administrasi tersebut adalah

penundaan pengundian nomor urut paslon, pengunduran tersebut diundur sampai paslon membuat dan menyerahkan surat pernyataan. Ketiga, seluruh bentuk kegiatan lain dilarang. Dalam pasal 57 huruf G, menyebutkan bahwa kegiatan yang tidak boleh dilakukan paslon dan tim adalah mengadakan rapat umum, kegiatan budaya seperti pentas seni, konser music, kegiatan olahraga seperti acara gerak jalan ataupun sepeda santai, kegiatan sosial seperti bazar dan donor darah serta peringatan HUT partai. Jika masih ada pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut, Bawaslu berhak memberi surat peringatan. Jika dalam satu jam peringatan tersebut tidak diindahkan maka Bawaslu wajib membubarkan ataupun menghentikan kegiatan tersebut. Keempat, pelanggaran protokol kesehatan saat pelaksanaan kampanye. Pelaksanaan kampanye harus dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan, yang sebagaimana sudah diatur dalam pasal 58, 59, dan 60. Apabila terdapat pihak-pihak yang melanggar maka Bawaslu berhak memberikan surat peringatan, dan jika dalam waktu satu jam surat tersebut tidak diindahkan maka Bawaslu berhak membubarkan kegiatan tersebut.

Kelima, adanya larangan dalam melibatkan kelompok-kelompok rentan. Adapun larangan yang melibatkan anak-anak, balita, ibu hamil ataupun menyusui serta orang-orang lanjut usia, jika ada yang melanggar maka akan diberi saksi selaku tertulis pada pasal 88E. Dalam Portal Informasi Indonesia menyebutkan adanya beberapa aturan yang diterapkan dalam mencoblos di TPS, yaitu jumlah pemilih di TPS dikurangi, adanya pengaturan jam saat pemilihan, adanya jaga jarak saat mengantri diluar maupun saat duduk didalam TPS, setiap TPS disediakan wastafel, adanya larangan berjabat tangan, petugas wajib menggunakan masker serta sarung tangan dan juga *face shield*, pemilih diharap membawa peralatan tulis sendiri, petugas yang bertugas harus menjalani rapid test, TPS didesinfektan terlebih dahulu, setiap selesai melakukan pemilihan tinta tidak lagi dicelupkan tetapi diteteskan oleh petugas, jika ada pemilih yang bersuhu tubuh tinggi (diatas 37,3 derajat celsius) maka akan diarahkan ke bilik khusus.

Tercatat di beberapa daerah kerap mengabaikan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan pemilu. Sejak tanggal 26 September hingga 1 Oktober tercatat sebanyak 54 kasus yang masuk. Safrizal (2020) selaku Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri menjabarkan adanya penambahan pelanggaran sebanyak 16 kasus pada tanggal 2 – 8 Oktober dan adanya tambahan lagi sebanyak 25 kasus pada 9 – 15 Oktober. Dari kasus-kasus tersebut 230 kasus diberi surat peringatan dan 35 kasus terjadi pembubaran acara. Melihat kasus-kasus tersebut Nur Elya Anggraini selaku Koordinator Divisi Hubungan

Masyarakat Badan Pengawas Pemilu mengatakan secara tegas meskipun dalam peraturan yang telah ditulis oleh KPU bahwa paslon yang melanggar protokol Kesehatan bisa di diskualifikasi tetapi bila ada paslon yang tetap melanggar protokol Kesehatan meskipun sudah diberi surat peringatan, bisa dijerat pidana dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum (*Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa di Kenakan Pidana*, 2020). Selain itu Choirul Anam selaku Ketua KPU Jawa Timur juga menambahkan bahwa dalam pilkada ini hal yang harus diutamakan adalah Kesehatan serta keselamatan (*Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa di Kenakan Pidana*, 2020).

Pada hari pertama kampanye yang dilaksanakan di Surabaya, dari paslon nomor 2 sedang mengadakan pertemuan dengan komunitas nelayan kenjeran di Pantai Ria Kenjeran dengan dihadiri 50 orang (*Sepi, Hari Pertama Kampanye Pilwali Surabaya Kurang Gereget*, 2020). Siangnya Paslon 2 menghadiri Silaturahmi Forum Kiyai Kampung Nusantara yang dilaksanakan di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, dengan jumlah peserta mencapai 200 orang dengan 4 ruang yang masing-masing ruangnya diisi oleh 50 orang. Dan malamnya paslon 2 kembali mengadakan pertemuan dengan warga yang bertepatan di Balai RW 8 di Perumahan Sutorejo Indah dan dihadiri oleh 100 orang, yang dibagi menjadi 2 kelompok dan ditempatkan pada 2 titik pertemuan yang berbeda. Sedangkan untuk paslon 1 tidak terlihat adanya kegiatan dalam menyapa warga Surabaya (*Sepi, Hari Pertama Kampanye Pilwali Surabaya Kurang Gereget*, 2020).

Setelah penetapan paslon, KPU Surabaya mengadakan deklarasi kampanye damai untuk kedua paslon. Acara tersebut dilaksanakan selama 3 hari berturut turut dan acara ini juga diramaikan dengan kelompok pemusik jalanan Surabaya (*Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Surabaya 2020, Dua Kubu Saling Berbalas Nyanyian*, 2020).

Gambar 1. Acara Deklarasi Kampanye Damai yang diadakan oleh KPU kota Surabaya



Terlansir oleh liputan 6 (2020), tercatat adanya pelanggaran protokol Kesehatan yang dilakukan oleh paslon 2. Acara tersebut digelar di Balai RW Pacar Kembang, kecamatan

Tambak Sari, meskipun awalnya peserta yang menghadiri dibatasi 50 orang akan tetapi pada kenyataannya masyarakat setempat dating berbondong-bondong menghadiri acara tersebut. Mengetahui hal tersebut tim Baswalu setempat telah datang dan membriefing tim suksesnya.

Gambar 2. Warga yang datang manghadiri di Balai RW setempat



Sejak seminggu terlaksananya kampanye di kota Surabaya, Bawaslu mengaku sudah mengeluarkan teguran sebanyak 12 kali kepada 2 paslon. Bawaslu terlihat enggan dalam memberi tahu paslon mana yang diberi teguran terbanyak. Meskipun telah melakukan pelanggaran, akan tetapi Agil selaku Ketua Bawaslu Kota Surabaya mengapresiasi tim paslon serta panitia. Setelah diberi peringatan baik secara lisan ataupun tertulis, tim paslon ataupun panitia dengan segera merespon dengan baik. Agil mengambil kecamatan Mulyorejo sebagai contoh pada kecamatan tersebut terjadi pelanggaran Protokol Kesehatan, setelah ditindak lanjuti kampanye tersebut akhirnya dibubarkan oleh Bawaslu setempat.

KESIMPULAN

Pandemi covid-19 yang melanda diseluruh dunia tidak terkecuali Indonesia, memiliki dampak yang sangat besar dalam perekonomian, Kesehatan, Pendidikan hingga kegiatan politik. Penyebaran virus covid-19 terhitung sangat cepat dikarenakan virus tersebut menular seperti virus influenza. Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang telah menjadi korban, pemerintah bermaksud memutuskan rantai penyebaran covid-19 dengan protokol Kesehatan, yaitu 3M (memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan).

Dengan adanya pandemi covid-19 beberapa negara yang pada Tahun 2020 mengadakan Pemilu, memilih mengundur jadwal Pemilu demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan mengadakan Pemilu beberapa negara khawatir akan menimbulkan serangan covid-19 gelombang kedua. Indonesia sendiri juga memutuskan untuk menunda

selama 3 (tiga) bulan, karena khawatir akan membahayakan masyarakat Indonesia sendiri. Meskipun adanya pro dan kontra dengan keputusan rapat tersebut, Pemilu tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dan kampanye dilakukan pada awal September.

Meskipun Kampanye dan Pemilu tetap dilaksanakan ditengah pandemi covid-19, pemerintah akan menerapkan protokol Kesehatan agar kampanye dan pemilu dapat terlaksanakan dengan aman. Beberapa aturan baru telah dikeluarkan oleh KPU untuk menunjang kampanye dan pemilu pada tahun 2020. Jika ada pihak yang bersangkutan melanggar aturan tersebut, Bawaslu setempat akan memberikan sanksi baik secara lisan maupun tertulis. Jika sudah diberi peringatan akan tetapi pihak yang melanggar tersebut tidak mengindahkan, maka Bawaslu berhak membubarkan kegiatan tersebut. Pada pelaksanaan kampanye, Bawaslu mencatat banyak paslon dari beberapa daerah melakukan pelanggaran protokol kesehatan, termasuk di Surabaya. Selanjutnya, pihak paslon dan panitia yang telah ditegur langsung merespon teguran dari Bawaslu setempat dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

ANTARA News. (2020). *Terjadi 16 pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye di Jawa Tengah.* Antara News. <https://m.antaranews.com/berita/1798305/terjadi-16-pelanggaran-protokol-kesehatan-saat-kampanye-di-jawa-tengah>

Bantuan Kuota Data dari Pemerintah, Ini Daftar Situs yang Bisa Diakses. (2020). suara.com. <https://www.suara.com/tekno/2020/09/24/080000/bantuan-kuota-data-dari-pemerintah-ini-daftar-situs-yang-bisa-diakses>

Banyak Kontestan Pilkada Abaikan Protokol Kesehatan. (2020). <https://www.alinea.id/amp/pemilu/banyak-kontestan-pilkada-abaikan-protokol-kesehatan-b1ZVn9xS>.

Baru Sepekan Bawaslu Surabaya Keluarkan 12 Teguran Kampanye. (2020). <https://www.gatra.com/detail/news/492196/politik/baru-sepekan-bawaslu-surabaya-keluarka-12-teguran-kampanye>.

BBCnews. (2020). *Pilkada 2020: Masa kampanye dimulai, cara tatap muka tetap dinilai "paling efektif."* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54299548>

Catat Sederet Larangan Dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020. (2020). <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/15362571/catat-sederet-larangan-dan-sanksisaat-kampanye-pilkada-2020?page=all#page3>.

Corona Menghentikan Semua, Kecuali Pilkada. (2020). Merdeka.Com. <https://m.merdeka.com/khas/corona-menghentikan-semua-kecuali-pilkada-pilkada-serentak.html>

Darmawan, D. (2017). *Mengenal Teknologi Informasi*.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._KURIKULUM_DAN_TEK._PENDIDIKAN/197111281998021-DENI_DARMAWAN/FILOSOFIS_TEKNOLOGI_INFORMASI_DAN_KOMUNIKASI.pdf&ved=2ahUKEwie6sqqpJHtAhUFdCsKHSuxDM4QFjAZegQILBAB&usg=AOvVaw0DAYCbhJS A1-2nOwqpNyHc&cshid=1605882545977

Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Surabaya 2020, Dua Kubu Saling Berbalas Nyanyian. (2020). <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4366971/deklarasi-kampanye-damai-pilkada-surabaya-2020-dua-kubu-saling-berbalas-nyanyian>

Demo Kontra UU Cipta Kerja Meluas di Berbagai Daerah. (2020). Jawapos. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/10/2020/demo-kontra-uu-cipta-kerja-meluas-di-berbagai-daerah/>

Dewi, E. A. S., Aristi, N., & Rachmaniar, R. (2020). Mapping of Education Information Networks in Community of Cintaratu Village Pangandaran. *The Journal of Society and Media*, 4(2), 279–297. <https://doi.org/10.26740/jsm.v4n2.p279-297>

DPR Sahkan “Omnibus Law” Undang-Undang Cipta Kerja. (2020). <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/18002101/dpr-sahkan-omnibus-law-undang-undang-cipta-kerja>

Ini Alasan Pilkada Tetap Dilaksanakan. (2020). [Republika.co.id. https://republika.co.id/amp/qh5ssl467](https://republika.co.id/amp/qh5ssl467)

Jokowi: Pilkada Serentak 2020 Harus Tetap Dilakukan. (2020). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200908114433-32-543915/jokowi-pilkada-serentak-2020-harus-tetap-dilakukan>

Kajian virus corona muncul di Wuhan sejak akhir Agustus, China sebut hasil itu “sebagai hal yang konyol.” (2020). BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52977852>

Kampanye Pilkada Serentak Dimulai 26 September, Ini Jadwal Lengkapnya. (2020). detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5052117/kampanye-pilkada-serentak-dimulai-26-september-ini-jadwal-lengkapnya>

Kountur, R. (2003). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. PPM.

Kumpanan. (2020). *48 Negara Masih Menunda Pemilu karena Pandemi COVID-19.* <https://kumpanan.com/rafael-ryandika/48-negara-masih-menunda-pemilu-karena-pandemi-covid-19-1uFqk4qRUDW/2>

Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa di Kenakan Pidana. (2020). Radar Surabaya. <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/10/05/217302/paslon-pelanggar-protokol-kesehatan-bisa-dikenakan-pidana>

Pelanggaran Protokol Kesehatan saat Kampanye Naik Hampir 60%. (2020). medcom.id. <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/4KZzea0K-pelanggaran-protokol-kesehatan-saat-kampanye-naik-hampir-60>

Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada Meningkat. (2020). KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/>

Pilkada Tetap Dilaksanakan di Tengah Pandemi, Azyumardi: Tak Ada Empati. (2020). KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/>

Portal Informasi Indonesia. (2020). Aturan Mencoblos di Pilkada Pada Masa Pandemi. Dapat dilihat pada: <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/aturan-mencoblos-di-pilkada-masa-pandemi>.

Puluhan Reaktif Covid-19, Ancaman di Tengah Demo Itu Nyata. (2020). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201008111026-4-192763/puluhan-reaktif-covid-19-ancaman-di-tengah-demo-itu-nyata>

Sepi, Hari Pertama Kampanye Pilwali Surabaya Kurang Gereget. (2020). <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5189358/sepi-hari-pertama-kampanye-pilwali-surabaya-kurang-gereget>

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19. (2020). KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/>

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Survei: 57,6 Persen Setuju Ekonomi Indonesia Memburuk Akibat Covid-19. (2020). liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/4273048/survei-576-persen-setuju-ekonomi-indonesia-memburuk-akibat-covid-19>

Video Kerumunan Warga Saat Kampanye Pilkada di Balai RW Tambaksari Surabaya. (2020). <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4370305/video-kerumunan-warga-saat-kampanye-pilkada-di-balai-rw-tambaksari-surabaya>.